

**Tinjauan Atas Prosedur Pengeluaran Kas
Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung**

Pembimbing:

Rini Septiani Sukanda, SE., M.Si

Oleh:

Firyal Pratami

21315010

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Komputer Indonesia

Email: firyalprtm@yahoo.co.id

ABSTRACT

Cash disbursement procedures that occurred in Bandung District Finance Agency is in conformity with the rules that apply even when entering the account number is often a mistake. In this study the authors intend to know how the procedure of cash expenditure that occurred in the Regional Finance Agency of Bandung regency, the authors also want to know what obstacles that occur during the implementation of cash disbursement procedures and what efforts have been done to solve problems that occur in the implementation procedure the cash outlay.

The research method used by the writer is using descriptive method, the results of research conducted by the author in conducting research in the treasury of the Regional Finance Agency of Bandung Regency is to know that the procedure of cash expenditure in the Regional Finance Agency Bandung regency has been run well, it can seen from the implementation of cash disbursement procedures that are in accordance with the applicable SOP. Although there are still a few mistakes in inputting it can still be overcome easily by the treasury in the District Finance district bandung based. Based on the description above, the authors provide some suggestions at the end of this final task, which presumably can be used as consideration for the Regional Finance Agency of Bandung Regency in implementing cash disbursements procedure.

Keywords: Procedures, Cash disbursements

I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan/kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah. Berdasarkan UU 33 Tahun 2004 pasal 66 ayat 1, keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat. Fenomena yang terjadi dalam perkembangan keuangan daerah di Kabupaten Bandung saat ini mencerminkan adanya respon rakyat yang sangat tinggi akan permintaan tata keuangan pemerintah Kabupaten Bandung yang baik (*good government governance*), hal ini terbukti dengan adanya tuntutan masyarakat akan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Bandung. Fenomena yang terjadi dalam prosedur pengeluaran kas yang ada di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung adalah adanya masalah saat akan dibuatnya SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) pada saat akan dibuat seringkali bagian pembendaharaan salah dalam memasukan nomor rekening oleh karena itu data SP2D tidak bisa diproses dan harus dibenarkan kembali agar tidak terjadi kesalahan.

Berdasarkan penjelasan diatas maka penelitian ini akan mengkaji **“TINJAUAN ATAS PROSEDUR PENGELUARAN KAS PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG“**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dia atas, maka rumusan masalah yang diajukan adalah:

1. Bagaimana prosedur pengeluaran kas pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung?
2. Apa saja hambatan pengeluaran kas pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung?
3. Upaya apa saja yang telah dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah

Kabupaten Bandung dalam mengatasi hambatan yang terjadi pada prosedur pengeluaran kas?

1.3 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur pengeluaran kas dan proses pembuatan surat-surat apa saja yang dibutuhkan saat akan mengeluarkan biaya kas pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui prosedur pengeluaran kas pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui serta mempelajari berbagai macam hambatan/masalah yang dihadapi dalam prosedur pengeluaran kas Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung.
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam prosedur pengeluaran kas pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung.

1.5 Kegunaan Penelitian

- a) Kegunaan Praktis
 1. Mengembangkan daya kreatifitas sehingga ditengah-tengah masyarakat. nanti dapat menentukan langkah untuk dapat aktif menggunakan peranya
 2. Mengetahui tata cara kerja khususnya pada bidang pencatatan kas.
 3. Mengetahui tahap pencatatan pengeluaran kas secara manual dan komputerisasi.
- b) Kegunaan Akademis
 1. Sebagai bahan masukan untuk memperbaiki kinerja perusahaan/instansi dalam efektivitas.
 2. Mampu menerapkan, menggali pengetahuan yang berkaitan dengan bidang akuntansi dalam

dunia praktek yang sesungguhnya

II. Kajian Pustaka

2.1 Pengertian Prosedur

Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. (Mulyadi 2016 : 4)

Pedoman yang berisi prosedur operasional yang ada didalam suatu organisasi yang digunakan untuk memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan, serta penggunaan fasilitas-fasilitas proses yang dilakukan oleh orang-orang dalam organisasi yang merupakan anggota organisasi berjalan efektif dan efisien, konsisten, standar dan sistematis. Rudi M Tambunan (2013 :84)

2.2 Pengertian Kas

Cash, which is the most liquid or fluid asset, is the standard exchange medium and the basis of measurement and accounting for all other items. (Kieso 2015:342)

Yang Artinya

Kas yaitu aktiva yang paling likuid atau lancar, merupakan media pertukaran standar dan dasar pengukuran serta akuntansi untuk semua pos-pos lainnya.

Fungsi Kas

- a) Beban.
- b) Pemasok untuk barang dagangan dan aset lain.
- c) Bunga untuk kreditur.
- d) Dividen untuk pemegang saham. (Carl S. Warren, James M. Reeve, Jonathan E. Duchac, Novrys Suhardianto, Devi S. Kalanjati, Amir Abadi Jusuf, Chaerul D. Djakman 2014:736)

Pembelian, dipersiapkan berdasarkan perkiraan atau rencana penjualan yang akan

dibutuhkan nanti. Penerimaan Barang, ketika barang diterima pada gudang, bagian gudang membuat laporan penerimaan dan tanggal terimanya. Hutang dan Pengeluaran Kas, bila semua data dalam komputer termasuk permintaan pembelian, laporan penerimaan dan dari penjual disetujui, maka hutang akan dicatat, pengeluaran kas disetujui dan cek ditulis untuk pembayaran. (Azhar Susanto 2013:197)

2.3 Pengertian Pengeluaran Kas

Suatu catatan yang dibuat untuk melaksanakan kegiatan pengeluaran baik dengan cek maupun dengan uang tunai yang digunakan untuk kegiatan umum perusahaan. (Mulyadi 2016 : 42)

2.3.1 Pengeluaran Kas Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung

Berdasarkan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan nomor 14 tentang Akuntansi Kas.

B. Kas di luar pengelolaan BUD (Bendahara Umum Daerah)

Kas di Bendahara Pengeluaran, apabila Bendahara Pengeluaran bukan bagian dari BUD.

Disamping mengelola uang persediaan (UP), Bendahara Pengeluaran juga mengelola uang lainnya, antara lain meliputi:

- a. Uang yang berasal dari Kas Negara, melalui SPM-LS/SP2D yang ditujukan kepadanya;
- b. Uang yang berasal dari potongan atas pembayaran yang dilakukannya sehubungan dengan fungsi bendahara selaku wajib pungut; dan
- c. Uang dari sumber lainnya yang menjadi hak negara.

2.3.2 Prosedur Pengeluaran Kas di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan prosedur pengeluaran kas sebagai berikut :

1. Prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPD sebagaimana dimaksud meliputi :

Sub prosedur akuntansi pengeluaran kas-langsung; dan

Sub prosedur akuntansi pengeluaran kas-uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan.

2. Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud mencakup :

III. Metodologi Penelitian

3.1 Objek Penelitian

Tentang apa dan atau siapa yang menjadi objek penelitian, juga dimana dan kapan penelitian dilakukan, bisa juga ditambahkan dengan hal-hal jika dianggap perlu. (Husen Umar 2013:303)

Objek penelitian adalah suatu atribut atau atau sifat nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variabel tertentu yang diterapkan untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. (Sugiyono 2013:38)

Dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa objek penelitian ialah tentang apa dan kapan penelitian dilakukan dan mempunyai variabel tertentu yang diterapkan untuk dipelajari dan disimpulkan. Objek penelitian merupakan sasaran untuk mendapatkan tujuan tertentu mengenai suatu hal yang akan dibuktikan secara objektif untuk mendapatkan data

sesuai tujuan dan kegunaan tertentu. Ada juga objek penelitian yang penulis teliti disini adalah Tinjauan Atas Prosedur Pengeluaran Kas Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung.

3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian, sedangkan prosedur penelitian membicarakan alat-alat yang digunakan dalam mengukur atau mengumpulkan data penelitian. Dengan demikian, metode penelitian melingkupi prosedur penelitian dan teknik penelitian.

Berikut ini beberapa pengertian metode penelitian menurut para ahli :

Suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. (Darmadi 2013:153)

Cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. (Sugiyono 2014:2)

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Prosedur pengeluaran kas di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung

A. Penerbitan SPD (Surat Penyediaan Dana) digunakan untuk menyediakan dana bagi tiap-tiap SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) dalam waktu tertentu. Informasi dalam SPD menunjukkan secara jelas alokasi tiap kegiatan. Kemudian dibuatkan SPP (Surat Permintaan Pembayaran)

Hambatan dalam pelaksanaan prosedur pengeluaran kas yaitu adanya masalah pada saat akan menerbitkan SP2D yang disebabkan oleh adanya kesalahan bagian bendahara dalam memasukan nomor rekening oleh karena itu data SP2D tidak bisa diproses.

Upaya untuk mengatasi hambatan yang terjadi pada prosedur pengeluaran kas Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung mencari solusi dan menindaklanjutinya dengan melampirkan buku tabungan.

4.2 Pembahasan

4.2.2 Prosedur Pengeluaran Kas Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan. Keuangan Daerah, bahwa prosedur akuntansi yang diterapkan dalam lingkungan pemerintahan daerah meliputi prosedur pengeluaran kas daerah. Pengeluaran kas merupakan komponen sumber daya yang sangat penting di dalam melaksanakan program pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah.

Sedangkan menurut Mulyadi (2016:425) prosedur akuntansi pengeluaran kas yaitu:

a) Prosedur permintaan cek, yaitu Pengeluaran kas dengan cek menjamin diterimanya cek tersebut oleh pihak yang dimaksud oleh pihak pembayar.

c) Prosedur Pembayaran Kas, yaitu suatu catatan yang dibuat untuk melaksanakan kegiatan penerimaan uang dari penjualan tunai atau dari piutang yang siap dan bebas digunakan untuk kegiatan umum perusahaan.

d) Prosedur Pencatatan Pengeluaran Kas, yaitu Catatan ini digunakan untuk mencatat segala pengeluaran kas yang dilakukan oleh perusahaan. Dokumen sumber yang dipakai sebagai dasar pencatatan dalam jurnal ini adalah faktur dari pemasok yang telah dicap "lunas" oleh fungsi kas.

Dari kedua teori di atas sudah sesuai dengan prosedur pengeluaran kas yang ada di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung, karena kedua teori di atas menjelaskan pengeluaran kas melalui cek

dan rekening bank yang sangat sesuai dengan prosedur pengeluaran kas yang ada di BKD.

Hambatan Pengeluaran Kas pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung

Sedangkan Berdasarkan Undang-undang No. 17/2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara bahwa dokumen yang diperlukan belum lengkap, maka kuasa BUD membuat surat penolakan penerbitan SP2D dalam dua rangkap :

1. Dokumen diberikan kepada PPKD yang kemudian akan diberikan pada pengguna anggaran agar menyempurnakan SPM.

2. Dokumen diarsipkan oleh Kuasa BUD dalam register surat penolakan penerbitan SP2D.

Berdasarkan hasil penelitian penulis pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung, hambatan dalam melaksanakan prosedur pengeluaran kas sama dengan UU No.17 Tahun 2003 yang menjelaskan tentang proses penerbitan SP2D dari lembar pertama sampai dengan lembar keempat, .Di dalam lembar tersebut dimasukan no.rekening bank oleh bagian bendahara keuangan daerah dalam memasukanya/menginputkanya sering terjadi kesalahan dalam memasukan no.rekening bank sehingga SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) tidak bisa diproses dan harus diulang kembali untuk memasukan no.rekening yang benar.

Upaya Yang Dilakukan Dalam Terjadinya Prosedur Pengeluaran Kas Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung

Untuk meminimalisir hambatan terdapat beberapa upaya yang bisa dijalankan, seperti yang dikemukakan oleh Ong Teong Wan yang dikutip oleh Ruslan Efendy (2013:92) yaitu:

1.Mengidentifikasi masalah

Untuk mendapatkan fakta, kita perlu menarik pendapat dengan mengklarifikasi dan mengkonfirmasi untuk memahami apa dan mengapa. Hanya saat menyatukan fakta-

faktalah kita dapat menetapkan penyebab utama pelaku kinerja tidak dapat memenuhi target atau harapan.

2.Mencari solusi

Sesudah penyebab utama dimengerti dan diterima, pelaku kinerja akan lebih mudah mengusulkan solusi atau mengkontribusikan ide untuk pemecahan masalah secara bersama. Biasanya, begitu penyebab utama ditetapkan dan diterima, pelaku kinerja dapat memberikan solusi untuk mencegah serta perbaikan yang logis. Umpan balik yang membangun juga dapat digunakan untuk menyempurnakan solusi.

3.Implementasi solusi

Implementasi akan menjadi lebih mudah bila ada rasa kepemilikan terhadap solusi. Oleh karena itu, bila solusi tidak dijadikan sebagai suatu yang harus ditaati, tapi datang dari pelaku kinerja atau merupakan sesuatu yang dikembangkan bersama, akan muncul komitmen. Implementasi akan lebih cepat.

4.Menindaklanjuti solusi

Dibanyak kasus saat tidak ada rasa kepemilikan solusi, pemberdayaan dan kendali diri akan menjadi bentuk tindak lanjut terbaik.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung bahwa upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang ada dalam perusahaan sudah sesuai dengan teori Ong Teong Wan untuk mengatasi hambatan yang terjadi upaya yang dilakuka

V. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

1.Prosedur pengeluaran kas yang dilakukan oleh bagian pembendaharaan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung sudah sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) serta sudah mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri No.39 Tahun 2007 tentang tata cara mengelola keuangan daerah.

2.Hambatan yang terjadi dalam proses melaksanakan prosedur pengeluaran kas ialah sering terjadi kesalahan dalam menginput/memasukkanno.rekening,hambatan tersebut masih bisa diatasi oleh bagian pembendaharaan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung.

3.Upaya dalam mengatasi masalah tersebut sangat tepat yaitu dengan melampirkan buku tabungan atau rekening koran dan surat keterangan bank sehingga hambatan tidak terulang lagi.

5.2 Saran

Dalam meningkatkan kualitas kerja pegawai di bagian pembendaharaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung perlu adanya perancangan kembali prosedur dengan membuat perubahan-perubahan yang dibutuhkan dalam prosedur operasi standar dan formatnya sesingkat mungkin sehingga mudah untuk diisi. Tuliskan intruksi pengisian format dengan jelas pada tahapan yang memungkinkan terjadinya kesalahan memasukan no rekening.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhar Susanto. 2013. Sistem Informasi Akuntansi. Bandung : Lingga Jaya.
- Bambang Wahyudiono. 2014. Mudah Membaca Laporan Keuangan. Jakarta : Penerbit Raih Asa Sukses.
- Danang Sunyoto. 2013. Metodologi Penelitian Akuntansi. Bandung : PT RefikaAditama Anggota Ikapi
- Hamid Darmadi. 2013. Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial. Bandung :Alfabeta.
- Hery, 2014, Pengendalian Akuntansi Dan Manajemen, Kencana, Jakarta.
- Husein Umar. 2013. Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis. Jakarta : Rajawali
- Mulyadi. 2016. Sistem Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,

Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan dan R&D. Bandung : Alfabeta.

Suharsimi Arikunto, S. 2013. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta : Rineka Cipta.

Tambunan, Rudi M. 2013. Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedures (SOP). Edisi Kedua, Maiestas Publishing, Jakarta.

Tony Wijaya. 2013. Metodologi Penelitian Ekonomi & Bisnis Teori & Praktik. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Weigant, Kimmel, Kieso. 2015. Financial Accounting. IFRS Edition, Jakarta.

Undang-undang No. 17 Tahun 2003.

Undang-undang No. 1 Tahun 2004.

Sumber Internet :

www.bandungkab.go.id

Undang-Undang :

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.

Permendagri Nomor 59 Tahun 2007.

Permendagri Nomor 55 Tahun 2008.

Permendagri Nomor 39 Tahun 2007.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2012.

Peraturan Daerah atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016.

Peraturan Bupati Bandung Nomor 23 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016.

Peraturan Bupati Bandung Nomor 61 Tahun 2016.

Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005.

Lampiran

Lembar SPP (Surat Perintah Pembayaran)

